

URGENSI PAJAK DAERAH DAN PENGHASILAN DAERAH DALAM STRUKTUR PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Soeratno.^{)} dan Suparmono^{**)}*

ABSTRAK

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber pendapatan utama bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping penerimaan dinas-dinas, laba BUMD, dan penerimaan lain-lain. Studi secara deskriptif-komparatif perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam perekonomian Propinsi DI. Yogyakarta pada umumnya dan kabupaten serta kota pada khususnya. Dari hasil pengolahan data diperoleh kesimpulan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah mendominasi lebih dari 80 persen PAD. Hal ini dapat dilihat juga pada koefisien korelasi antara pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD yang nilainya diatas 0,9. Dilihat dari angka elastisitasnyapun, pajak daerah dan retribusi daerah nilainya bersifat elastis. Dengan kata lain, kedua sumber penerimaan ini merupakan variabel kunci dalam penilaian PAD dan penentuan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah di Propinsi DI. Yogyakarta.

Keyword: pajak daerah, retribusi daerah, PAD

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan pemerintahan daerah dan keuangan daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan dan hak bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur keuangan daerahnya secara lebih mandiri dan ini diwujudkan dalam UU No. 5 tahun 1974, UU No. 18 tahun 1997 dan UU No. 34 tahun 2000. Untuk lebih mengoptimalkan potensi keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah daerah diharapkan untuk mampu menggali segenap potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut berdasarkan asas keadilan dan asas manfaat (Ibnu Syamsi, 1993). Kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah merupakan hal yang bersifat *urgent*. Kaho (1999) mengatakan bahwa keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam melaksanakan pemerintahan secara baik. Untuk dapat mewujudkan kemampuan keuangan daerah yang baik, maka diperlukan sumber dana yang memadai. Setiap daerah, terutama daerah tingkat II, memiliki perbedaan kontribusi masing-masing pos penerimaan pada pendapatan asli daerah (PAD).

^{*)} Dr. Soeratno, M.Ec., adalah Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

^{**)} Suparmono, SE., M.Si., adalah Dosen Tetap pada Akademi Manajemen Perusahaan, Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (AMP YKPN) Yogyakarta.

Kewajiban melakukan upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, dengan memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Upaya ini merupakan sinergi dari berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang masih memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah daerah dan masyarakat luas.

Dalam perekonomian Propinsi DI. Yogyakarta sekilas dapat dideteksi bahwa keunggulan yang menonjol berasal dari sumber daya alam (kepariwisataan, perdagangan, hotel dan restoran, serta jasa lainnya) dan sumber daya manusia yang memadai untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Secara umum, dalam struktur pendapatan asli daerah (PAD), kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah seperti terlihat pada tabel 1. Berikut .

Tabel 1
Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pada PAD Propinsi DI. Yogyakarta, 1991 - 2000

Tahun Anggaran	Pajak Daerah		Retribusi	
	Daerah	%	Daerah	%
1991	4,006,170	37.31	4,955,165	46.15
1992	5,289,393	37.98	6,255,785	44.92
1993	5,973,584	37.17	7,225,562	44.97
1994	23,625,011	84.42	1,757,293	6.28
1995	33,870,891	86.67	2,377,182	6.08
1996	40,229,883	86.16	3,634,333	7.78
1997	46,577,177	87.06	3,222,528	6.02
1998	52,544,912	87.40	3,192,737	5.31
1999	34,136,041	84.09	1,225,948	3.02
2000	37,368,694	85.16	1,509,662	3.44
Jumlah	283,621,756	71.34	35,356,195	17.40

Sumber : Hasil olahan data PAD Propinsi. DIY, 1991- 2000, BPS.

Dalam dua tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 1996/1997 dan 1997/1998, PAD propinsi DI. Yogyakarta didominasi pajak daerah dan retribusi daerah yang jumlahnya sangat fluktuatif. Secara ideal, komposisi itu akan lebih baik bila laba BUMD dan penerimaan lain-lain juga ditingkatkan karena tingginya pajak merupakan suatu *leakege* (kebocoran) dalam perekonomian (Samuelson, 1997).

Pengukuran sumber-sumber PAD, seperti persentase kontribusi, korelasi antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, *trend* pertumbuhan PAD, dan elastisitas pajak daerah dan retribusi daerah

terhadap PAD penting untuk dilakukan karena dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan yang tepat sasaran.

PENERIMAANDAERAH

Penerimaan daerah merupakan sumber pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Macam sumber perolehan penerimaan daerah antara lain terdiri dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:

- a. Pos Pajak Daerah
- b. Pos Retribusi Daerah
- c. Pos Laba Badan Usaha Milik Daerah
- d. Pos Penerimaan dari Dinas-dinas
- e. Pos Penerimaan Lain-lain
3. Bagi hasil pajak dan bukan pajak
4. Bagian dari sumbangan dan bantuan
5. Penerimaan pembangunan yang terdiri dari pinjaman pemerintah dan pinjaman untuk BUMD

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan asli daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. PAD ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah daerah kota/kabupaten karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Realisasi PAD ini antarkabupaten dan antar propinsi setiap tahunnya dapat bervariasi, karena potensi setiap pos penerimaannya juga mengalami perkembangan.

Pajak Daerah

Ada banyak pengertian tentang pajak daerah, dalam hal ini diungkapkan dua pengertian pajak daerah dari Mardiasmo dan Rochmat Soemitro. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan biaya rumah tangga daerah tersebut (Mardiasmo, 1996). Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (1997), pajak daerah merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan negara dari sektor partikelir kepada sektor pemerintah) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen prestatite*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. pajak daerah merupakan setoran sebagian kekayaan individu atau badan untuk kas negara sesuai ketentuan undang-undang.

2. sifat pungutannya dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan prestasi/imbalance kembali secara langsung.
3. penerimaan pajak oleh negara dipakai untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan melayani kepentingan masyarakat.

Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. pajak daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Perbedaan antara pajak daerah dan pajak negara adalah terletak pada:

1. pajak negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat jenderal pajak) yang penggunaan dan alokasinya ditentukan pula oleh pemerintah pusat.
2. pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui pemerintah daerah atau pejabat negara yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Contoh pajak daerah adalah: pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak radio.

Ditinjau secara administratif daerah, pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Pajak daerah tingkat propinsi
contoh: pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
2. Pajak daerah tingkat Kota/Kabupaten
contoh: pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame.

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada obyek pajak yang belum dikenakan oleh negara (pusat). Disamping itu ada ketentuan bahwa pajak daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki obyek pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

2.3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan suatu bentuk pungutan sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan atas jasa yang nyata dari pemerintah daerah, seperti pelayanan pekerjaan, pertukaran barang, atau ijin yang dikeluarkan

oleh pemerintah daerah. Pungutan ini dikenakan atas kegiatan untuk memperoleh manfaat tertentu dan pemerintah daerah berkepentingan untuk mengadakan pengawasan atas kegiatan tersebut dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum.

Secara umum, sumber penerimaan retribusi terbesar bagi pemerintah kabupaten antara lain berasal dari retribusi pasar, retribusi rumah sakit, retribusi ijin bangunan, dan retribusi terminal. Ada beberapa faktor yang ikut menentukan besarnya penerimaan retribusi bagi pemerintah daerah, yaitu antar lain: kebijakan tarif yang dibebankan, kualitas dan kuantitas jasa layanan yang diberikan dan tuntutan masyarakat atas pelayanan tersebut.

Secara teoritis, retribusi daerah dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. **Retribusi jasa umum**
Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan. Contoh retribusi jasa umum adalah retribusi atas pelayanan kesehatan, retribusi pasar, dan retribusi air bersih.
2. **Retribusi jasa usaha**
Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Contoh dari retribusi jasa umum ini adalah retribusi terminal, retribusi tempat umum parkir, dan retribusi tempat penitipan anak.
3. **Retribusi perijinan tertentu**
Retribusi perijinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin atas orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh retribusi perijinan tertentu adalah retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi ijin trayek, dan retribusi ijin gangguan.

ALAT ANALISIS

Trend Data Runtun Waktu

Trend data runtun waktu digunakan untuk mengetahui proyeksi dan ketersediaan dana di masa datang. Variabel pajak daerah dan retribusi daerah akan dihitung proyeksi tahunannya sehingga pemerintah daerah dapat mendeteksi awal ketersediaan dana setiap tahunnya.

Koefisien Korelasi

Tahapan kedua dalam alat analisis ini adalah menghitung nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasi (r) merupakan alat analisis untuk menghitung derajat keeratan hubungan antar dua variabel. Keeratan hubungan antar variabel ini dihitung terpisah antara variabel X dan variabel Y. Untuk variabel pajak daerah terhadap PAD dan variabel retribusi daerah terhadap PAD. Keeratan hubungan antarvariabel ini dapat dilihat dari koefisien korelasinya, yang nilainya antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 maka semakin erat keterkaitan antar variabel tersebut, begitupula sebaliknya.

Elastisitas Pajak dan Retribusi Daerah

Alat analisis elastisitas PAD terhadap PDRB merupakan ukuran untuk menentukan struktur PAD di suatu daerah.

Selanjutnya dengan teknik regresi dalam bentuk logaritma dengan koefisien regresi dari persamaan dalam bentuk logaritma dengan bilangan pokok e secara matematis dapat diketahui. Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln PAD} = \text{Ln } a_1 + b_1 \text{ Ln pajak daerah}$$

$$\text{Ln PAD} = \text{Ln } a_2 + b_2 \text{ Ln retribusi daerah}$$

HASIL PENELITIAN

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua sumber penerimaan utama dalam struktur

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selalu diandalkan dari tahun ke tahun oleh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dilihat dari tabel 3.1, kontribusi pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu mulai dari 37,31 persen pada tahun 1991 menjadi 85,16 persen pada tahun 2000. Kontribusi terbesar dari pajak daerah ini terjadi pada tahun 1997 dan 1998 sebesar 87,06 persen dan 87,40 persen. Pengaruh krisis ekonomi yang terjadi di kuartal keempat tahun 1997 tidak berdampak besar pada kontribusi pajak daerah terhadap PAD Propinsi DI. Yogyakarta.

Kondisi sebaliknya terjadi pada sumber penerimaan daerah dari retribusi yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat tajam. Pada tahun 1991, kontribusi retribusi daerah sebesar 46,15 persen dan mengalami penurunan sangat tajam pada tahun 1994 menjadi 6,28 persen. Pada tahun 2000, kontribusi retribusi daerah hanya 3,44 persen saja. Kontribusi retribusi daerah mengalami penurunan berkaitan dengan semakin rendahnya jasa layanan

yang diberikan oleh pemerintah, baik yang bersifat komersial maupun berbentuk layanan publik yang bersifat nir laba. Layanan pemerintah yang berupa layanan komersial, yaitu retribusi terminal dan retribusi tempat umum parkir. Kedua jenis layanan ini rentan terhadap penyimpangan dan bersifat *diseconomies of scale*.

Peranan sumber pendapatan lainnya masih relatif rendah, yaitu dari laba BUMD yang hanya 4,57 persen. Kondisi ini dikarenakan daerah belum mampu mengeloa BUMD secara optimal, karena banyak misi yang diemban oleh BUMD, yaitu selain sebagai lembaga yang bersifat *profit oriented* juga sebagai lembaga layanan publik. Secara lengkap, persentase perkembangan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD untuk Propinsi DI. Yogyakarta, kabupaten, dan Kota Yogyakarta sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2000 dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini.

Tabel 2
Persentase Perkembangan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD, 1991 - 2000

Tahun	Kln.Progo		Bantul		Gn.Kidul		Sleman		Kota		Propinsi DIY	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
1991	8.46	43.14	11.58	74.88	5.11	78.19	47.41	29.72	53.31	39.14	37.31	6.15
1992	7.62	41.27	9.52	76.49	4.17	79.59	43.24	35.07	56.34	33.59	37.98	4.92
1993	7.76	39.26	8.21	75.09	3.79	80.97	44.57	34.41	54.46	33.42	37.17	4.97
1994	7.72	39.36	7.72	39.36	4.64	77.95	41.05	38.52	46.64	43.88	84.42	6.28
1995	7.10	36.72	7.10	36.72	4.83	76.63	44.40	33.91	50.19	41.19	86.67	6.08
1996	11.18	31.65	11.18	31.65	14.17	65.62	53.08	31.45	52.82	39.24	86.16	7.78
1997	13.41	29.82	13.41	29.82	18.85	63.49	46.38	23.87	55.22	36.73	87.06	6.02
1998	12.53	25.79	12.53	25.79	17.77	65.88	46.84	25.63	53.96	37.73	87.40	5.31
1999	9.89	68.40	9.89	68.40	18.04	59.25	48.89	23.45	51.40	35.84	84.09	3.02
2000	11.33	43.14	11.33	77.50	18.17	66.02	52.48	31.91	55.22	32.18	85.16	3.44
2001	9.26	45.63	15.64	78.48	19.8	65.20	59.24	30.21	56.36	35.12	86.41	5.32
Rerata	9.70	39.85	10.25	53.57	10.95	71.36	46.83	30.79	52.96	37.29	71.34	17.40

Keterangan :

P adalah pajak daerah

R adalah retribusi daerah

Sumber: hasil pengolahan data PAD, BPS

Kontribusi terbesar Kabupaten Kulon Progo pada struktur PAD nya adalah dari retribusi daerah yang rata-rata sebesar 39,85 persen, sedangkan dari pajak daerah hanya 9,70 persen. Penerimaan dinas-dinas merupakan kontributor kedua terbesar dalam struktur PAD yaitu sebesar 28,98 persen. Kontribusi retribusi daerah dari tahun ketahun selalu mengalami fluktuasi terutama setelah terjadinya krisis ekonomi, tetapi kecenderungannya terus mengalami peningkatan. Kontribusi retribusi daerah terbesar terjadi pada tahun 1999, yaitu sebesar 68,40 persen. Untuk pajak daerah, *trendnya* terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun persentasenya relatif rendah, yaitu dari 8,46 persen pada tahun 1991 menjadi 11,33 persen pada tahun 2000.

Seperti halnya Kabupaten Kulon Progo, retribusi daerah merupakan kontributor terbesar terhadap PAD di Kabupaten Bantul, yaitu rata-rata sebesar **53,57** persen selama tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. Selintas hal ini dapat difahami karena Kabupaten Bantul kaya akan sumber daya alam yang dijadikan obyek wisata sehingga pemerintah daerah Kabupaten Bantul memanfaatkan potensi tersebut sebagai sumber pendapatan daerah dari sisi retribusi daerah. Retribusi yang memberikan kontribusi terbesar adalah retribusi parkir, retribusi kawasan wisata, retribusi ijin trayek, dan retribusi ijin mendirikan bangunan.

Perbandingan antara pajak daerah dan retribusi daerah untuk Kabupaten Gunung Kidul sangat tidak berimbang. Persentase retribusi daerah rata-rata sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2000 adalah sebesar 71,36 persen. Angka ini jauh dari kontribusi pajak daerah yang hanya sebesar rata-rata 10,95 persen selama tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. Persentase kontribusi pajak daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan kenaikan tertinggi terjadi sejak tahun 1996 yaitu mengalami kenaikan sebesar 10 persen dari tahun sebelumnya.

Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten yang memiliki PAD terbesar di Propinsi DI Yogyakarta setelah Kota Yogyakarta dengan rata-rata PAD sebesar Rp. 13.118.229.000 sejak tahun 1991 sampai dengan

tahun 2000. Peranan pajak daerah dan retribusi daerah relatif berimbang, yaitu 46,83 persen dari pajak daerah dan 30,79 persen dari retribusi daerah. Kontribusi penerimaan dinas-dinas di Kabupaten Sleman relatif besar dibandingkan dengan daerah lainnya, yaitu rata-rata 11,44 persen selama tahun 1991 sampai dengan tahun 2000. Besarnya PAD Kabupaten Sleman dapat dilihat dari potensi daerah yang ada di Kabupaten Sleman, yaitu dari pertanian, perdagangan, pendidikan, dan jasa-jasa lainnya. Potensi pajak daerah dari tahun ke tahun relatif stabil dan *trendnya* mengalami peningkatan. Begitu pula dengan retribusi daerah yang sempat mengalami penurunan pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2000.

Kota Yogyakarta memiliki PAD yang terbesar dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Propinsi DI. Yogyakarta atau hampir lima kali lipat PAD Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo. Hal ini tidaklah mengherankan karena Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi (*central business district*) Propinsi DI. Yogyakarta. Perbandingan kontribusi antara pajak daerah dan retribusi daerah tidaklah mengalami ketimpangan seperti yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul. Kontribusi rata-rata pajak daerah selama tahun 1991 sampai dengan 2000 adalah 52,95 persen, sedangkan kontribusi retribusi daerah adalah sebesar 37,29 persen.

Trend Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Menemukan persamaan *trend* untuk pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting bagi pemerintah daerah masing-masing. Alasannya adalah karena kedua variabel ini merupakan variabel kunci dalam menentukan besar kecilnya PAD suatu daerah. Dengan demikian ketepatan peramalan mengenai jumlah pajak daerah dan retribusi daerah dimasa datang menjadi suatu yang mutlak diperlukan. Persamaan *trend* untuk masing-masing kabupaten, kota dan propinsi dapat dilihat pada tabel 3. Berikut ini.

Tabel 3
Persamaan *Trend Data Runtun Waktu*
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD 1991 - 2000

Daerah	Trend Pajak Daerah	Trend Retribusi Daerah
Kulon Progo	$Y = 283.854 + 33.466 X$	$Y = 331.321.583 + 182.816 X$
Bantul	$Y = 311.378 + 27.811 X$	$Y = 1.614.519 + 125.216 X$
Gunung Kidul	$Y = 372.303 + 54.877 X$	$Y = 372.303 + 125.576 X$
Sleman	$Y = 3.860.050 + 448.554 X$	$Y = 2.295.198 + 228.264 X$
Kota	$Y = 7.336.572 + 583.368 X$	$Y = 5.094.026 + 360.358 X$
Propinsi DIY	$Y = 28.362.175,60 + 2.455.337,52 X$	$Y = 3.535.620,50 + 244.635,32 X$

Sumber: hasil olahan data, BPS. 2001.

Kedua persamaan *trend* garis lurus pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing kabupaten, Kota, maupun Propinsi DIY, dapat digunakan untuk melakukan peramalan, yaitu dengan memasukkan nilai X pada masing-masing persamaan sehingga dapat diketahui proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun-tahun mendatang.

Korelasi antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Koefisien korelasi dalam analisis ini bertujuan untuk melihat keeratan hubungan antara pajak daerah

terhadap PAD dan retribusi daerah terhadap PAD. Secara umum, untuk setiap kabupaten maupun kota di Propinsi DI. Yogyakarta, korelasi antara pajak daerah terhadap PAD lebih besar dari 0,9. Koefisien korelasi antara retribusi daerah dan PAD juga relatif tinggi, terutama untuk Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Secara rinci, koefisien korelasi antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD untuk masing-masing kabupaten, kota dan propinsi dapat dilihat pada tabel 4. Berikut ini.

Tabel 4
Koefisien Korelasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD 1991 - 2000

Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
Kulon Progo	0.974	0.894
Bantul	0.961	0.834
Gunung Kidul	0.977	0.989
Sleman	0.996	0.964
Kota	0.995	0.978
Propinsi DIY	0.996	0.628

Elastisitas Pajak Daerah dan Retribusi

Elastisitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD yang diperoleh disini memiliki arti bahwa apabila pajak daerah ataupun retribusi daerah berubah sebesar satu persen, maka PAD akan berubah sebesar persentase dari masing-masing variabel. Sesuai dengan

hipotesis yang telah ditetapkan diawal bab I, seluruh kabupaten, kota dan Propinsi DI. Yogyakarta pajak daerah dan retribusi daerahnya bersifat elastis. Secara lengkap, nilai elastisitas dari masing-masing variabel untuk masing-masing daerah dapat dilihat pada tabel 5. berikut ini.

Tabel 5
Persamaan Garis Regresi
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PAD 1991 - 2000

Daerah	Persamaan Garis Regresi
Kulon Progo	$Y = 4.465 + 0.569 \text{ pajak} + 0.231 \text{ retribusi}$
Bantul	$Y = 4.416 + 0.656 \text{ pajak} + 0.155 \text{ retribusi}$
Gunung Kidul	$Y = 0.668^* + 0.135 \text{ pajak} + 0.862 \text{ retribusi}$
Sleman	$Y = 1.331 + 0.798 \text{ pajak} + 0.169 \text{ retribusi}^*$
Kota	$Y = 0.637^* + 0.652 \text{ pajak} + 0.356 \text{ retribusi}$
Propinsi DIY	$Y = 3.909 + 0.666 \text{ pajak} + 0.142 \text{ retribusi}^*$

Keterangan :

* : tidak signifikan pada $\alpha = 10\%$

Sumber: hasil olahan data, BPS. 2001.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya bagi propinsi DI. Yogyakarta. Hal ini mengakibatkan tingginya ketergantungan keuangan daerah pada dua sumber penerimaan tersebut.
2. Sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan, seluruh kabupaten, kota dan Propinsi DI. Yogyakarta pajak daerah dan retribusi daerahnya bersifat elastis. Ini membawa konsekuensi bahwa apabila pemerintah ingin meningkatkan PAD, maka pajak daerah dan retribusi daerah menjadi variabel kunci bagi peningkatan PAD.
3. Dilihat dari koefisien korelasi dan *trend* runtun waktu, dapat dikatakan bahwa pemerintah sangat menggantungkan diri pada pajak daerah dan retribusi daerah dalam pembiayaan pembangunan

daerah. Kondisi ini sebenarnya tidaklah terlalu baik mengingat besarnya pajak akan berdampak pada perekonomian yang akan mengalami kontraksi.

Saran

1. Ketergantungan pembiayaan dalam struktur keuangan daerah pada satu atau dua sumber penerimaan akan riskan apabila terjadi gejolak ekonomi yang mengganggu sumber pendapatan tersebut. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, sebaiknya pemerintah daerah lebih menggali dan mengefektifkan sumber penerimaan lain, misalnya dari laba BUMD dan penerimaan lain-lain.
2. Dilihat dari besarnya PAD, antardaerah terjadi ketimpangan yang sangat tajam terutama antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul dengan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Untuk itu pemerintah daerah Propinsi mendorong percepatan pembangunan di kedua kabupaten tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1999/2000, Badan Pusat Statistik Propinsi DI. Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Keuangan dan Ekonomi Indonesia (SEKI)*, BPS. tahun 2001.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI Tahun 1997, Penerbit CV. Eka Jaya, Jakarta, 1997.

Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 1996.

Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta, 1977.

Samudra, Azhari, *Perpajakan di Indonesia; Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Samuelson, PA dan William Nordhaus, *Economics*, 16th edition, Penerbit McGraw Hill, tahun 2000.

Sutrisno, PH, *Dasar-Dasar Keuangan Negara*, Penerbit Karunika, Universitas Terbuka, Jakarta, 1986.

